



MEDIASI

Manajemen, Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi

Volume 06 Nomor 01 Juli 2017

Azizul Kholis dan Deci Fiferonica Purba

KEPEMILIKAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI INTELLECTUAL CAPITAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Bunga Irhamna Khalida Tanjung dan Nasrul Syakur

PENERAPAN METODE DRILL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA MATERI MENULIS HURUF KAPITAL SISWA KELAS II SD AL-WASHLIYAH 01 MEDAN

Erik Herianto Tampubolon dan Lili Wardani Harahap

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN FIRM SIZE TERHADAP KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2014

Haradongan Sianturi

ANALISIS PERAN PEMUDA DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Itsnaini Hasanah dan Yulita Triadiarti

PENGARUH DER, ITO, DAN DPR TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014

Januar Parlentino dan Surbakti Karo-Karo

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KUALITAS KAP, FIRMSIZE DAN LEVERAGE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015

Mahfudzoh Sinaga dan OK Sofyan Hidayat

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT LAPORAN KEUANGAN, DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Yossi Annisa Hendry dan Chandra Situmeang

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI HUMAN CAPITAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA

JURNAL MEDIASI UNIMED

Penanggung Jawab :

Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D
Dekan Fakultas Ekonomi

Dewan Penasehat Redaksi :

Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si
Drs. La Ane, M.Si
Drs. Jhonson, M.Si

Pimpinan Redaksi

Dr. Azizul Kholis, SE., M.Si

Anggota redaksi

Pasca Dwi Putra, SE, M.Si
Ali Fikri Hasibuan, SE, M.Si
Sulaiman Lubis, SE, M.M

Dewan Pakar/ Penyunting Ahli

Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd (Universitas Negeri Medan)
Prof. Imam Ghozali, M.Kom, Ph. D., Ak., CA (Universitas Negeri Medan)
Prof. Azhar Maksum, M. Ec., Acc., Ph.D., Ak (Universitas Sumatera Utara)
Dr. Mhd. Yusuf Harahap, M.Si (Universitas Negeri Medan)
Dr. Filtra Waty, M.Si (Universitas Negeri Medan)
Dr. Nasirwan, SE., M.Si., Ak., CA (Universitas Negeri Medan)
Dr. Saidun Hutasuhut, M.Si (Universitas Negeri Medan)
Dr. Muammar Kadafi, SE., M.Si., Ak., CA (Universitas Malikussaleh Lhokseumawe)
Dr. Iskandar Muda, SE., M.Si., Ak., CA (Universitas Sumatera Utara)
Dr. Gusnardi, M.Si., Ak., CA (Universitas Riau)
Dr. Bambang Satriawan, SE., M.Si (Universitas Batam)

Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Alamat Redaksi

Jl. Williern Iskandar Pasar V Medan Estate
Kotak Pos. 1589 Medan Sumatera Utara Kode Pos 20221
Telp. 061.6625973 Fax 061. 6614002 e-mail : azizulkholis1@gmail.com

Jurnal Mediasi adalah jurnal ilmiah berkala yang terbit dua kali setahun pada setiap bulan juli dan desember. Jurnal ini memuat hasil penelitian dan kajian konseptual bidang Manajemen, Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi. Tujuan penerbitan berkala ini adalah menyediakan wadah diseminasi hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh para dosen, peneliti dan praktisi untuk menjadi rujukan akademis dan perluasan ilmu pengetahuan. Redaksi menerima artikel dari penulis sesuai kriteria dan persyaratan penulis yang ditetapkan.

DAFTAR ISI

No.	Penulis	Judul	Hal
01	Azizul Kholis Deci Fiferonica Purba	PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN INFORMASI INTELLECTUAL CAPITAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA	1-15
02	Bunga Irahma Khalida Tanjung Nasrul Syakur	PENERAPAN METODE DRILL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA MATERI MENULIS HURUF KAPITAL SISWA KELAS II SD AL-WASHLIYAH 01 MEDAN	16-31
03	Erik Herianto Tampubolon Lili Wardani Harahap	PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN FIRM SIZE TERHADAP KONDISI FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2014	32-46
04	Haradongan Sianturi	ANALISIS PERAN PEMUDA DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH	47-59
05	Itsnaini Hasanah Yulita Triadiarti	PENGARUH DER, ITO, DAN DPR TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PERTUMBUHAN MODAL SENDIRI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2012-2014	60-77
06	Januar Parlentino Surbakti Karo Karo	PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, KUALITAS KAP, FIRMSIZE DAN LEVERAGE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015	78-90
07	Mahfudzoh Sinaga OK Sofyan Hidayat	PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT LAPORAN KEUANGAN, DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	91-102
08	Yossi Annisa Hendry Chandra Situmeang	PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MELALUI HUMAN CAPITAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA	103-118

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT LAPORAN KEUANGAN, DAN PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Mahfudzoh Sinaga
Universitas Negeri Medan

OK Sofyan Hidayat
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan yang masih seringnya terdapat permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang ada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak 44 auditor dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu auditor yang pernah melakukan audit selama tiga tahun terakhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya bahwa dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal dan hasil audit laporan keuangan yang baik, serta penerapan *good governance* yang maksimal maka akan semakin menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Audit Laporan Keuangan, Penerapan *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. (PP No. 71, 2010). Menurut (Mahsun, dkk, 2011:115) Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai.

Sebagai salah satu informasi yang paling berguna dalam rangka pengambilan keputusan maka laporan keuangan haruslah berkualitas. Menurut (Harahap, 2008 : 126) Karakteristik kualitatif (kualitas) merupakan suatu ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Nurillah, 2014). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Nurillah, 2014).

Karakteristik kualitatif yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni (1) Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka. Selain itu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. (2) Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. (3) Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. (4) Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan (Hariyanto, 2012). Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan aktif untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu informasi yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Namun,

pada kenyataannya permasalahan di dalam laporan keuangan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat masih sering terdapat permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Terlihat dari fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 yang diperiksa pada semester I tahun 2016 untuk seluruh daerah di Indonesia menemukan dan mencatat permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 6.016 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1,17 triliun, potensi kerugian daerah sebesar Rp538,88 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp809,01 miliar. Permasalahan tersebut kerap terjadi karena masih terdapatnya kelemahan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah sehingga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 : 2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya (PP No. 60: 2008): (1) Lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan pengawasan intern (PP No. 60 Tahun 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012). Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2008). *“The financial statements other than as a means to provide financial information also serves as a means of accountability and performance evaluation of financial performance in particular.”* (Agung and Winarningsih, 2016). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP No. 71 Tahun 2010). Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Menurut (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008) Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. “*Improvements of monitoring and reporting on internal control to improve the quality of financial reporting on the banking industry.*” (Altamuro & Beatty, 2010). “*Internal control over financial reporting is a system of checks and balances which is monitored by management and reviewed by the board of directors and internal auditors.*” (Nuryanto & Afiah, 2013). Menurut (Premuroso & Houmes, 2012) terdapat pengaruh yang kuat antara *internal control* dengan *financial statement*.

2.4 Audit Laporan Keuangan

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten (Arens & Loebbecke, 2012:7).

Menurut (Mulyadi 2010:9), Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut (Agoes 2012:4) Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.5 Penerapan *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good Governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). Sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Tasios & Bekiaris (2012) menyatakan bahwa salah satu faktor utama rendahnya kualitas laporan keuangan adalah pemerintahan yang buruk.

2.6 Tujuan Penerapan *Good Governance*

Penerapan *good governance* sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sikap kepercayaan di kalangan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi suatu organisasi untuk dapat berkembang lebih baik lagi. Penerapan *good governance* dapat menciptakan laporan

keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan stakeholders baik bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing (Salam, 2007). Tiga aspek utama yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2009:189). Ketiga aspek ini sangat diperlukan pemerintah dalam merumuskan pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja kepada masyarakat.

- a. Pengawasan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga lain baik di pusat maupun daerah untuk mengawasi kinerja pemerintahan.
- b. Pengendalian (control), yaitu mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Pemeriksaan (audit), yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan

2.7 Kerangka Berfikir

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan/organisasi, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber organisasi. Semakin baik sistem pengendalian internal maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula.

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja suatu organisasi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hasil audit berujung pada laporan yang berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dengan kriterianya, atau ketidaksesuaian dengan menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut. Maka dari itu audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.

Penerapan *good governance* dapat menciptakan laporan keuangan berkualitas. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara

politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Keberhasilan penerapan *good governance* dan kualitas laporan keuangan dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Km. 5,5 Medan 20122. Memilih BPKP sebagai objek penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa BPKP merupakan auditor internal pemerintah dimana kegiatannya tidak sepenuhnya kegiatan audit melainkan lebih kepada pengawasan yang bersifat pembinaan. Dalam kegiatan pengawasan ini, auditor internal ditempatkan sebagai “*consultant*”, dengan fokus kerja yang dilakukan yaitu melakukan penilaian terhadap penggunaan sumber daya agar menjadi efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, auditor internal dalam hal ini BPKP, lebih diposisikan sebagai “*catalyst*”, yaitu membantu manajemen maupun pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam organisasi/pemerintah. Secara fungsional BPKP memiliki peran yang efektif dalam membangun negara menjadi lebih baik, khususnya dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2017 hingga selesai. Sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang pernah melakukan audit laporan keuangan selama tiga tahun terakhir dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memperlihatkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$ atau $F_{hitung} (19,528) > F_{tabel} (2,84)$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* secara simultan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga baik buruknya sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* secara simultan mempengaruhi baik buruknya kualitas laporan keuangan. Hasil ini didukung dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,564. Artinya sebesar 56,4% variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen, dan selebihnya yaitu sebesar 43,6% ($100 - 56,4$) dijelaskan oleh faktor lain selain variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini dilihat bahwa secara parsial sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan nilai koefisien regresi (β) dari hasil perhitungan koefisien bertanda positif. Hal ini sesuai dengan teori yang diharapkan dimana sistem pengendalian internal mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas laporan keuangan. Artinya adalah semakin baiknya sistem pengendalian internal pada suatu organisasi maka laporan keuangan yang dihasilkan juga

akan semakin berkualitas. Hal ini sependapat dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jika suatu pengendalian internal telah ditetapkan maka semua operasi, sumber daya dan data akan terkendali, tujuan akan tercapai, risiko dapat diminimalisir, dan informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan ditetapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dan dapat diaudit. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Herawati, 2014) bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Audit laporan keuangan dalam penelitian ini secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan nilai koefisien regresi (β) dari hasil perhitungan koefisien bertanda positif. Hal ini sesuai dengan teori yang diharapkan dimana audit laporan keuangan mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas laporan keuangan. Artinya adalah semakin baik hasil audit laporan keuangan maka laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Hal ini sependapat dengan Boynton (2007) yang menyatakan bahwa audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (UU No. 15 Tahun 2004).

Penerapan *good governance* secara parsial memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan nilai koefisien regresi (β) dari hasil perhitungan koefisien bertanda positif. Hal ini sesuai dengan teori yang diharapkan dimana penerapan *good governance* mempunyai hubungan yang positif dengan kualitas laporan keuangan. Artinya adalah semakin baik penerapan *good governance* maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Hal ini sependapat dengan Salam (2007) yang menyatakan bahwa *good governance* dapat menciptakan laporan keuangan pemerintah berkualitas dan menekankan pada proses pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta keterlibatan stakeholders baik bidang sosial, ekonomi, maupun politik serta pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien adalah salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Azlim, dkk, 2012) bahwa penerapan *good governance* memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan yaitu sistem pengendalian internal, audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance* memiliki pengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha (0,05)$, yang artinya semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, hasil audit laporan keuangan, dan penerapan *good governance*, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Diketahui bahwa jika penerapan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga dengan audit laporan keuangan yaitu dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sama halnya dengan sistem pengendalian internal dan audit laporan, penerapan *good governance* juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ketiganya memiliki fungsi dan tujuan yang dapat memberi dampak bagi hasil penyusunan laporan keuangan

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti mencoba memberikan beberapa saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya maupun pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Pemerintah daerah sebaiknya menerapkan sistem pengendalian internal, memperbaiki struktur dan proses organisasi berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang diperoleh dari hasil audit laporan keuangan, dan memaksimalkan penerapan *good governance* sehingga laporan keuangan pemerintah daerah bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik lagi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data cakupan yang lebih luas sehingga dapat menggambarkan kondisi yang ada dan memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya dengan menambah jumlah sampel yang digunakan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini atau menambah variabel lain yang dianggap mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

REERENSI

Agung, Mulyo and Srihadi Winarningsih. 2016. *Effect of Auditor and Internal Control Competence Apparatus For Local Government Quality of Financial Reporting*. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research Vol.4, No.7, pp.113-127, July 2016

Altamuro, Jennifer and Anne Beatty, 2010. *How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting?*. Journal of Accounting and Economics 49 (1-2): 58-74

Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat

Arens and Loebbecke. 2012. *Auditing Pendekatan Terbaru*. Jakarta: Salemba Empat

Azlim, dkk. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 pp. 1- 14

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*. Melalui <http://www.bpk.go.id> (25 Oktober 2016)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*. Melalui <http://www.bpk.go.id> (25 Oktober 2016)

Baridwan, Zaki. 2008. *Sistem Akuntansi Peyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: BPPE

Boynton, William C., et al. 2007. *Modern Auditing*. Jakarta: Erlangga.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro

Gondodiyoto, Sanyoto. 2007. *Audit Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Rajawali Pers

Herawati, Tuti. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 ISSN : 1693-4482

Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1*

Tahun 2012 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Melalui <http://www.google.com> (03 Oktober 2016)

Kieso, Donald E, et al. 2010. *Intermediate Accounting*. Asia: John Wiley & Sons Inc.

Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.2 (2014): 230-244 ISSN: 2302-8556

Mahsun, Moh., dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mulyadi. 2010. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat

Nurillah, As Syifa. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 1, No. 1, Halm: 2337-3806

Nuryanto, Muhammad and Nunuy Nur Afiah. 2013. *The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province - Indonesia)*. World Review of Business Research Vol. 3. No. 4. November 2013 Issue. Pp. 157 – 171

Oktarina, Mia dkk. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang*. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016

TENTANG PENULIS

Elfrida Sinaga : adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

OK Sofyan Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA : adalah Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

